

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

ALW, Lita Tyesta, 2020, *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Normatif Delegated Legislation di Indonesia (Studi Kasus: Peraturan Komisi Pemilihan Umum)*, Pustaka Media.

Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat, Jakarta: Rineka Cipta

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Astini, Titin, dan Aah Johariyah, 2004, *Melakukan Proses Administrasi*, Armico, Bandung.

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, 2004, Cet. Kedua, Yogyakarta: FH UII Press

Bradley, AW and KD Ewing, 2003, *Constitutional and Administrative Law*, 13th Edition, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate.

Bryan, A. Garner, 2009, Editor in Chief, *Black's Law Dictionary*, West Thomson Reuters.

H.A.S. Natabaya, 2006, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.

Hasan, Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Huda, Ni'matul, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan 10, Jakarta: Rajawali Pers.

Husaini, Aiman, 2006, *Tobat Merokok (Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok)*, Depok: Pustaka Ilman.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Jimly Asshiddiqie, 2014, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kelsen, Hans, 1973, *General Theory of Law and State*, (Translate by Anders Wedberg, Russell & Russell, New York,

Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang- Undangan: Dasar dan Cara Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.

Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah, 2020, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Makassar: Social Politic Genius (SIGn).

Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang- Undangan Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, dalam Nurul Qamar dan farah Syah Rezah, Ilmu dan Teknik.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono. 2007, *Pengantar Penelitian Huku*,. Jakarta: UI Press.

Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal:

Ade Resty Ambar Wati, “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 4, No. 2, 2017

Aeda Ernawati, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD RAA Soewondo Pati, *Jurnal Litbang*, Vol. XII, No. 2, 2016.

D. Erdos, “The UK GDPR, the Immigration Exception and Brexit: Interrogating Open Rights Group v Secretary of State for the Home Department and Its Aftermath,” *Modern Law Review*, 86, no. 3 (2023).

Dian Agung Wicaksana, “Implikasi dan Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia ”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 1, Maret 2013.

Ergina Faralita, *Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariat Islam Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Vol. 4 No. 2, 2020, Fakultas Syariah UIN Antasari.

Firmansyah, Heri, Kajian Metodologis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Rokok, *Jurnal: Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 4, nomor 1, 2019, Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Fathorrahman, Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 7, No. 2, Desember 2018

Heru Setyawan dan Indri Fogar Susilowati, Kesadaran hukum Mahasiswa Terhadap Aturan Tentang Area Kawasan Tanpa Rokok (Studi di kampus Universitas Negeri Surabaya), *Jurnal Novum*, Vol. 05, No. 03, 2018.

Munaya Fauziah dan Sugiati, Alur Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dalam Perspektif Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2018, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 15, No. 1, 2019.

Ni'matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2006.

Reno Renaldi, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Mahasiswa di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru, *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol. 2, No. 5, 2014

Retno Saraswati, “Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Media Hukum*, Vol. IX, No. 2.

Rin Agustina A’yuni dan Nasrullah, Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol. 2, No. 1, 2020

Shantanu Saharan and Pankaj Jangir, “Concept of Delegated Legislation and Its Legal Application in a State,” *International Journal of Law Management & Humanities*, 3, no. 4 (2020).

Yana Agus Setianingsih, dkk, “Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Sebagai Bagian Dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus Pada STIKES di Kota Semarang)”, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2012.

Lain-lain:

A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita VI), *Disertasi Doktor*, (Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Hasil Perubahan dan Naskah Asli UUD 1945, dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005)

Bafrizal Achyard, Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun No. 5 Tahun 2016), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

Hijrah, Keefektifan Kebijakan Area Bebas Asap Rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

P. Daly, "How Binding Are Binding Guidelines? An Analytical Framework," *Canadian Public Administration*, 2023, <https://doi.org/10.1111/capa.12519>

Paulus E Lotulung, Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum, *Makalah* disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema "Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan" Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, 14 -18 Juli 2003.

Dan Charan, Bhagwati, Doctrine Of Permissible Limits Under Delegated Legislation, 15 Januari 2011, <http://legalservicesindia.com/article/article/d>

Dan Charan, Bhagwati, Doctrine Of Permissible Limits Under Delegated Legislation, 2011, <http://legalservicesindia.com/article/article/doctrine-of-permissible-limits-under-delegated-legislation-497-1.html>, diakses 22 Agustus 2011.

http://en.wikipedia.org/wiki/Delegated_legislation, diakses 8 Agustus 2024

Ichwan Sam, dkk. Keputusan Ijma Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009, Jakarta Pusat: MUI, 2009.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2006.